

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad modern, masyarakat Barat “mangambil jarak” dengan gereja dalam tatanan kehidupan praktis. Hasilnya Barat mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, tapi dalam Islam hal demikian nyaris tidak ditemukan.<sup>1</sup> Gambaran inilah yang terjadi dalam beberapa periode di wilayah pemerintahan Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pergeseran paradigma dan pandangan masyarakat dunia di atas semakin menguat dengan adanya gelombang gerakan yang disebut dengan renaissance di beberapa negara-negara barat.

Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung semenjak lama, bahkan Islam sudah masuk wilayah ini semenjak abad ke-tujuh masehi, namun belum mengalami perkembangan yang signifikan.<sup>2</sup> Islam menjadi mayoritas di wilayah ini, ketika Muslim telah memiliki kekuatan politik. Hal ini terbukti dengan berdirinya pusat-pusat pemerintahan Islam, misalnya kerajaan Demak, Banten dan lainnya. Disamping itu kekuatan politik Muslim terus membaik, disebabkan karena pengaruh kerajaan Hindu dan Budha semakin melemah. Faktor lain yang ikut mendorong perkembangan Islam adalah karena kedatangannya bukanlah sebagai penakluk, seperti bangsa Portugis dan Spanyol, tetapi Islam datang dengan jalan damai, tidak dengan pedang, melainkan dengan cara yang menunjukkan sebagai *rahmah li-al ‘alamin*.<sup>3</sup> Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa kedatangan Islam di suatu wilayah dan tempat tertentu lebih mengedepankan perdamaian bukan dalam bentuk infiltrasi kekuasaan.

Pendapat lain menjelaskan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-12 M, bersamaan dengan masuknya Islam di Pasai dan daerah pantai

---

<sup>1</sup>Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern, Sentuhan Islam terhadap Berbagai Disiplin Ilmu* (Bandung : Pustaka Sestia, 2006), 11-15.

<sup>2</sup>Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), 44.

<sup>3</sup>Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007), 171.

utara Aceh sekarang. Untuk lebih jelasnya, menurut Ki M.A Machfoeld, ada tiga teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia atau di wilayah Nusantara, yaitu:

*Pertama*, permulaan Islam masuk ke Nusantara semenjak abad ke-7 seperti yang dikemukakan oleh Hamka dan dibawa oleh pedagang Muslim Arab dan lainnya. *Kedua*, proses Islamisasi di wilayah Nusantara telah mulai sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 M, yang dibawa oleh Muslim Arab, Persia, India (Gujarat dan Benggala). Pendapat ini dipegang oleh Uka Tjandrasasmita. Pendapat yang *ketiga* menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12 M.<sup>4</sup> Penyebaran agama Islam di Indonesia menurut beberapa sumber dilakukan oleh orang Arab, Persia, Gujarat. Sebuah penemuan baru menyatakan bahwa penyebaran Islam juga dilakukan oleh orang Cina, tepatnya orang-orang Yunan, yang pada akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan Islam di Palembang.<sup>5</sup>

Pada masa-masa selanjutnya, penyebaran agama Islam terutama di pulau Jawa (bagian wilayah Nusantara) pada periode awal, banyak dilakoni oleh “wali sembilan” yang lebih dikenal dengan “walisongo”.<sup>6</sup> Peyebaran Islam oleh para wali di Jawa Timur melalui jalur perdagangan, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang rasional. Sementara itu di wilayah Jawa Tengah para wali menggunakan pendekatan dengan media kesenian yang diganderungi masyarakat seperti wayang dan media kesenian lainnya, akan tetapi dimodifikasi sesuai dengan konteks Islam.<sup>7</sup>

Memasuki masa penjajahan, proses islamisasi lebih dihiasi oleh semangat jihad untuk melawan kolonial penjajahan. Oleh karena itu, banyak corak gerakan aktifis Islam pada masa ini lebih bercorak fundamentalis<sup>8</sup>. Pada masa ini pola

---

<sup>4</sup>Ki Moesa A. Machfoeld, *Filsafat Dakwah Ilmu Dakwah dan Penerapannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 3. Lihat juga Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000), 31. Cet ke-2

<sup>5</sup>Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007), 171.

<sup>6</sup>Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, h.171-173

<sup>7</sup> Asep Muhyiddin dan Agus Safei, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 124-125.

<sup>8</sup>Fundamentalis yang berafiliasi dengan agama tertentu sering melahirkan pandangan pro dan kontra bahkan dikesankan sebagai pandangan dan gerakan yang negatif di kalangan penganut-penganutnya. Fundamentalis sering dilekatkan dengan Islam, mayoritas pemahaman digiring

penyebaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu: Penyebaran Islam lewat pendidikan atau pesantren dan penyebaran Islam lewat organisasi-organisasi sosial keagamaan.<sup>9</sup>

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan Islam, adalah suatu yang menarik untuk dikaji dan dibahas, Ditinjau dari sudut historis itu maka dapat dibagi menjadi beberapa priode, yaitu; Priode Pra kemerdekaan, Priode Pasca kemerdekaan, Priode Revolusi, Priode Ordelama (Demorasi dipimpin), Priode Ordebaru dan Priode Reformasi dari 1997 sampai sekarang.<sup>10</sup> Masing-masing priode penguasa tersebut, dalam hal hubungan dan interaksi Islam dengan pemerintah, sangatlah dinamis dan diologis.

Menurut Snouck Hurgronje, proses Islamisasi berlangsung kurang dari satu abad, Hal ini dapat dibuktikan, bahwa kurang dari satu abad itu Islam sudah menyebar ke dunia non-Arab, mulai dari Gibraltar sampai ke perbatasan Cina. Pada wilayah Nusantara-Indonesia sekarang, semenjak runtuhnya Majapahit Islam menjadi penguasa baru menggantikan posisi Majapahit sebagai “penguasa” di Timur Jauh khususnya kepulauan Jawa dan Sumatera, agama pendudukpun berganti dari Hindu ke Islam.<sup>11</sup>

Perjalanan Islam dari wilayah Arab ke wilayah-wilayah di luar arab telah menyebabkan terjadinya akulturasi budaya setempat dengan Islam, bahkan terkadang Islam dapat menggantikan budaya yang telah berlaku lama pada wilayah-wilayah tertentu. Misalnya di Aceh ada pepatah yang sudah dikenal oleh penduduk Aceh yang berbunyi sebagai berikut :

---

kepada pemahaman yang negatif. Sebetulnya Fundamentalisme dibutuhkan dalam setiap agama, jika fundamental dipahami dengan hal-hal yang mendasar dalam sebuah agama. Dalam Islam, Istilah Fundamentalisme sangat populer setelah revolusi Islam yang bertujuan untuk mengeliminasi gerakan gerakan yang muncul dalam gelombang kebangkitan Islam. Secara umum Fundamentalisme Islam dapat dipahami sebagai oppositionalism, penolakan terhadap hermeneutika, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme, serta penolakan terhadap aspek historis dan sosialis. Lihat : Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, ( Jakarta: Paramadina, 1996), 107-110. Lihat juga dalam Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 46.

<sup>9</sup>Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* ( Jakarta: Kencana, 2007), 180-189.

<sup>10</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 187-209.

<sup>11</sup>Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje X* ( Jakarta: Inis, 1994 ), h. 5-

“Adat bak Poteu Meureuhom,  
*Hukom bak Syiah Kuala ( Ulama )*  
*Qanun-undang-undang- bak Putrou Phang*  
*Reusam bak Laksamana,*  
*Hukom ngon Adat*  
*Lagee zat ngon sifeueut.*

Terjemahan bebas dari pepatah di atas adalah  
Adat di tangan Raja  
Hukum di tangan Ulama  
Undang-undang berasal dari Putri Pahang  
Adat kebiasaan berasal dari Lakksamana  
Hukum dan adat, bagaikan zat dan sifat.<sup>12</sup>

Senada dengan ini, juga ditemui pepatah Minangkabau, yaitu:  
*Adaik basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK)*  
*Syarak mangato, Adaik mamakai.*<sup>13</sup>

Dua pepatah pada dua wilayah berbeda yang penulis kemukakan di atas dapat menjadi bukti bahwa Islam merupakan dominasi kekuatan politik dan hukum di wilayah nusantara semenjak sebelum kedatangan kaum Imprealisme ke wilayah ini. Kedatangan Imprealisme ke Nusantara telah melemahkan pengaruh Islam di masyarakat, oleh karena tujuan imprialisme adalah menguasai wilayah dan kekayaan serta menyebarkan agama yang mereka anut yaitu Kristen. Jadi, tak dapat dipungkiri, pada priode-priode awal pertentangan Islam-Kristen cukup kuat, bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam agama pribumi sedangkan Kristen agama penjajah. Pengaruh kuat Islam terhadap tatanan kehidupan masyarakat nusantara di kala itu dapat juga dibuktikan lewat bahasa tulis yang dipakai oleh masyarakat ketika itu, misalnya kita kenal dengan tulisan Arab-Melayu, ini adalah salah satu bukti perpaduan Arab-Islam dengan Melayu nusantara.

---

<sup>12</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung;Pustaka Setia,2014),95

<sup>13</sup> Maksud peribahasa ini adalah Adat berlandaskan kepada Syara', sedangkan Syara' baerlandaskan kepada kitabullah ( Al-quran), Syara' mengatakan saja dalam bentuk Firman sedangkan adat akan mempraktekkan dalam bentuk prilaku.

Jika dikaji sejarah perjalanan bangsa ini, maka akan ditemukan sederetan nama tokoh pejuang Islam yang berusaha keras menentang pendudukan penjajah di wilayah Nusantara. Mereka bergerak dalam organisasi keagamaan atau organisasi perjuangan kemerdekaan. Mereka itu antara lain: Fatahillah, Pati Unus dan Pangeran Jayakarta yang berjuang melawan Portugis. Kemudian juga kita kenal Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Abdullah Ternate dan lain-lain. Pejuang-pejuang tersebut melawan penjajah untuk membebaskan wilayah Nusantara yang sedang dijajah.<sup>14</sup> Gerakan-gerakan perjuangan Islam di masa ini menurut penulis, sangat sarat dengan semangat jihad untuk menyebarkan Islam, disamping perjuangan melawan penjajah juga merupakan proses pewarnaan Islam di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan demi kesinambungan Islam di Nusantara, bagaikan patah tumbuh-hilang berganti, bahkan sampai terbentuknya organisasi keagamaan yang mapan dan sekaligus memperjuangkan ideologi Islam.

Suasana wilayah Nusantara sampai pertengahan abad 19 M masih belum stabil, dikarenakan, masih dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain. Kekuasaan Islam saat itu merupakan berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, yang belum terikat dalam ide-ide nasionalisme kebangsaan. Menurut penulis, ini merupakan salah satu sebab munculnya pemikir-pemikir Islam. Kemunculan pemikir-pemikir itu, tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Di Indonesia misalnya muncul beberapa nama pemikir di antaranya: Haji Abdullah Ahmad<sup>15</sup> (1878-1933 M), Syaech Muhammad Djamil Djambek<sup>16</sup> (1860-1947 M), Syaech Abdul Karim Amrullah<sup>17</sup> (1879-1945M), Haji Agus Salim<sup>18</sup> (1884-1954), H.O.S Tjokroaminoto<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Djauharuddin AR, *Peranan Umat Islam dalam Pembentukan dan Pembangunan Negara Berdasarkan Pancasila dan UUD-45* ( Bandung : Angkasa, 1993), 7.

<sup>15</sup>Abdullah Ahmad Lahir di Padang Sumatera Barat pada tahun 1878, Ide-ide pembaruan telah mampu mengubah wajah Islam di Indonesia umumnya, terutama dalam corak pendidikan agama Islam dari corak tradisional menjadi bentuk yang modern yaitu bentuk klasikal, Lihat : Tim Penulis Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta : Djembatan 1992), 116.

<sup>16</sup> Ia tokoh terkemuka yang lahir di bukit tinggi Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat pada usia 87 tahun di Indonesia dikenal dengan bapak Ilmu Falaq.

<sup>17</sup> Beliau lahir di Maninjau Sumatera Barat tahun 1879 dan wafat pada usia 66 tahun, beliau adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang telah berhasil mendirikan sekolah di masanya yang dinamai dengan Sumatera Thawalib 1911/1918 dengan tujuan lebih memudahkan ide-ide pembaharuannya.

(1882-1934M), Muhammad Natsir<sup>20</sup> (1908-1994M), serta Syafruddin Prawiranegara (1911-1989 M).

Ibnu Khaldun, menjelaskan dalam *Muqaddimah* bahwa setiap manusia cenderung hidup bermasyarakat dan berorganisasi. Hal ini tersirat dalam ungkapannya “ *Al- Insanu Madaniyyun bi al thabi'i* (Manusia berpotensi ingin berkuasa). Ini berarti manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan.<sup>21</sup> Salah satu organisasi politik itu adalah negara. Tokoh-tokoh yang penulis sebutkan di atas adalah pemikir-pemikir yang berjuang demi berdirinya negara yang berdaulat dan terbebas dari jajahan bangsa lain.

Banyak organisasi pergerakan Islam di Indonesia yang sudah silih berganti menjalankan aktifitasnya, namun tidak terlibat langsung dalam politik pemerintahan. Pada tahun 1950-an barulah ada sebuah organisasi Islam yang terlibat langsung dalam politik yaitu Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Meskipun demikian, organisasi politik ini pada akhirnya kandas. Dan Syafruddin Prawiranegara ikut serta dalam gerakan Masyumi tersebut.

Syafruddin Prawiranegara berpandangan, orang Islam yang berjuang dalam politik seharusnya bergabung bersama partai politik Islam untuk membangun negara ini. A. Gaffar Azis dalam bukunya *Berpolitik untuk Agama*, mengatakan bahwa politik harus berjalan berdampingan dengan agama, dengan artian agama harus bersatu dengan negara.<sup>22</sup> Namun dalam prakteknya tidak berjalan mulus sesuai dengan idealnya,. Hal ini dapat dibuktikan dengan Dinamika kemenangan dan kekalahan partai-partai politik islam sebagai instrument

---

<sup>18</sup>Nama aslinya adalah masyudul haq sedangkan Agus adalah panggilan waktu kecil dan Salim adalah potongan akhir dari nama ayahnya Sutan Muhammad Salim, ia seorang tokoh Islam yang anti pati dengan penjajah belanda, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak maunya Agus salim menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Belanda, dari sepuluh anaknya diajarnya dan didiknya sendiri.

<sup>19</sup>Seorang tokoh yang gigih dalam melawan penjajah di Indonesia lahir 1882-1934

<sup>20</sup>M. Natsir salah seorang negarawan Muslim, ulama, intelktual muslim, pembaharu dan politikus kenamaan Plus disegani, lahir 17 juli 1908 di Al;ahan Panjang Sumatera barat daerah yang subur dan kaya dengan ragam pemikiran pembaharuan di saat itu, terlahir dari pasangan Sutan sario Pado dan Khadijah. Lihat : Majalah sabili, Makar Global Menohok Islam, Terbitan 12 April 1999, 29.

<sup>21</sup>Ibnu Khaldun, *Mukaddimah* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2011), 71. terjemahan Ahmadi Thoha.

<sup>22</sup>A. Gaffar Azis, *Berpolitik Untuk Agama, Missi Islam, Kristen, Yahudi Tentang Politik*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000 ), h.49.

demokrasi bagi umat Islam. Bahkan, kegagalan partai-partai Islam dianggap mencerminkan akhir era politik aliran di Indonesia (*the end of ideology*). Kondisi ini dinilai menjadi puncak dari kegagalan politik Islam sepanjang sejarah politik Indonesia, yang sebetulnya sudah diperjuangkan sejak sebelum masa kemerdekaan<sup>23</sup>

Untuk memahami ragam Islam politik di Indonesia, termasuk membedakan yang radikal dan non-radikal, ada lima klasifikasi menurut Arskal Salim.<sup>24</sup> Kelima tingkat tersebut mencakup, *Pertama*, Penerapan aturan-aturan Islam tentang keluarga yaitu hukum yang mengatur, nikah, talak, rujuk serta *Faraid*. *Kedua*, Pemberlakuan hukum Islam dalam hal ekonomi dan lembaga keuangan seperti *zakat*, *waqaf*, dan perbankan Islam. *Ketiga*, pemberlakuan hukum dalam bidang *ta'zir*. *Keempat*, penerapan hukum *hudud* dan *qishosh* untuk kasus perzinahan, dan lain-lain. *Kelima*, Usulan dan keinginan menjadikan Islam sebagai sistem ketatanegaraan.

Perjuangan berantai yang telah memakan berbagai bentuk pengorbanan, akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamkan kemerdekaan RI pada bulan Agustus 1945 oleh Soekarno – Hatta.<sup>25</sup> Sekalipun pejuang-pejuang golongan nasionalis agama tidak berhasil membentuk negara yang baru berdiri itu dengan negara yang berdasarkan ideologi Islam, dengan dibatalkannya tujuh kata dalam sila pertama yang telah diusulkan pemikir-pemikir Islam saat itu. Tujuh kata yang dibatalkan itu adalah; “Kewajiban menjalankan syar’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata ini merupakan ujung dari rangkaian sila pertama dalam Pancasila. Kegagalan mempertahankan tujuh kata dalam sila pertama itu merupakan bentuk kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok

---

<sup>23</sup>Pandangan demikian misalnya diungkapkan oleh Bahtiar Effendy yang menegaskan kekalahan partai Islam pada pemilu 2009 adalah bukti kesekian bahwa Islam tidak lagi menjadi faktor penting dalam politik Indonesia. Ia meyakini politik partisan kehilangan relevansi di Indonesia. Effendy, Bahtiar, “*Islamic parties have long been at an impasse*,” Jakarta Post, 17 April, 2009.

<sup>24</sup>Arskal Salim, *Challenging Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008), 46.

<sup>25</sup>Mestika Zed, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang terlupakan* (Jakarta : Grafiti, 1997 ), 12

nasionaalis agama demi mempertahankan keutuhan kehidupan bernegara. Hasil dari kompromi itu adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI yang berdasarkan idiologi Pancasila.

Secara alamiah pergerakan-pergerakan kemerdekaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh ide-ide perubahan pemikiran di berbagai belahan dunia, seperti ide-ide pemikiran yang berkembang di Prancis dan Inggris pada abad 17 dan 18 M. Sebagai bukti kongkrit adalah revolusi Amerika (1776-1782 dan Perancis 1789 M. Contoh lain adalah kemampuan Jepang dalam menyerap ide-ide dari Eropa barat sehingga Jepang mampu mengalahkan Rusia dalam tempo singkat, yaitu dalam rentang waktu satu tahun (1904-1905). Perkembangan dunia secara menyeluruh ini mampu mendatangkan inspirasi positif bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda dan bermuara pada teretusnya Budi Utomo 1908 yang dibentuk oleh Soetomo.<sup>26</sup>

Secara garis besar pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu: gerakan nasionalisme non agama dan nasionalisme Islam, lebih rinci lagi ada juga yang memilih bekerja sama dengan pihak penjajah “golongan kooperator” terhadap kolonialisme. Dari berbagai bentuk pergerakan kemerdekaan itu Syafruddin Prawiranegara lebih memilih yang sifatnya kooperator, dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum cukup tenaga untuk mengelolah negara ini.<sup>27</sup>

Menurut Husain al-Attas, ada empat corak dan tipe pemikir di Indonesia yaitu: Pertama, tipe Soekarno yang mengakui kebenaran ajaran Islam dan hidup sebagai Muslim, tetapi tidak percaya kepada organisasi Islam. Kedua, tipe Sutan Syahrir yang meskipun secara formal memeluk agama Islam, tetapi tidak mempunyai kesadaran jiwa Islam, kesadaran dan jiwanya adalah Humanisme barat. Ketiga, tipe Tan Malaka yang meninggalkan kepercayaannya dan menjadi seorang Komunis, walaupun tidak terang-terangan memusuhi Islam. Keempat, tipe Syafruddin Prawiranegara yang tetap memegang teguh kepercayaan

---

<sup>26</sup>Ahmad Subadja Djayoadisuryo, *Peranan ide-ide dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta : Idayu Press 1977), 10-15

<sup>27</sup>Ajib Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah swt* (Jakarta : Inti Idayu Press, 1986), 44.

agamanya dan percaya kepada organisasi politik Islam serta mempunyai keahlian dalam suatu bidang ilmu modern yang tidak dilepaskannya dari sudut kepercayaannya sebagai Muslim.

Lebih lanjut Husain al-Attas berkomentar tentang diri Syafruddin Prawiranegara, sebagai berikut:

“Demikianlah penelitian ekonomi telah dihubungkan dengan ajaran Islam oleh Syafruddin Prawiranegara, Inilah contoh cara manusia baru masyarakat Islam membimbing umat Islam kearah kemajauan zaman. Manusia baru itu harus mahir dalam ilmu-ilmu zaman sekarang. Sebaliknya ilmu-ilmu itu tidak dilepaskan dari panduan agama. Keduanya itu dihubungkan.<sup>28</sup>

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa respon pemikir-pemikir Islam atas situasi dan kondisi umat Islam berbeda satu-sama lain. Di Indonesia corak pemikiran para tokohnya terbelah kepada dua bentuk, yaitu: berbentuk Nasionalis dan Nasionalis agamis, pemikir yang berbentuk Nasionalis misalnya Soekarno, sedangkan yang berbentuk Nasionalis agamis misalnya M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, keduanya merupakan tokoh sentral dalam organisasi Masyumi. Setelah kedua tokoh ini terlibat dalam pergerakan PRRI, mereka cenderung bergerak dalam amal-bakti, dan aksi-aksi sosial di masyarakat.

Syafruddin Prawiranegara dalam berbagai karyanya, telah banyak mendiskripsikan keadaan bangsa Indonesia. Setelah mengurai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, beliau menawarkan solusi-solusi yang harus ditempuh oleh pemerintah saat itu. Pada masa Orde Lama misalnya, menurutnya kesalahan mendasar yang dilakukan pemerintahan Orde Lama adalah “tidak dibenarkan adanya selisih pendapat, yang diizinkan adalah pendapat yang mendukung pendapat resmi dari kalangan pemerintah, dengan demikian tidak didapatkan informasi-informasi yang benar dari pihak lain”. Kondisi seperti ini tentu tidak kondusif bagi bangsa yang sedang mengalami berbagai masalah, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>29</sup> Di samping itu, Orde Lama juga lebih cenderung meninggalkan dan menjaukan masyarakat dari paham Ke-tuhanan. Alasan Syafruddin

---

<sup>28</sup>Ajib Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah swt*, 23

<sup>29</sup>Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna ekonomi Islam, Kumpulan karangan terpilih Jilid II* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988), 235.

berpendapat demikian adalah bahwa, pemerintah Orla lebih berpihak kepada partai Komunis dan memberikan peluang serta kiprah yang banyak kepada partai Komunis untuk berkiprah dalam pemerintahan. Merespon situasi ini Syafruddin mengemukakan kritiknya bahwa, perbaikan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis ekonomi semata, akan tetapi juga harus diikuti dengan perbaikan mentalitas dan jiwa manusia Indonesia.<sup>30</sup>

Kritikan-kritikanya juga ditujukan kepada Orde Baru, menurut Syafruddin, bangsa Indonesia akan terus terpuruk jika penyelenggara negara banyak diemban oleh orang-orang yang tidak amanah dan tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Tidak amanah dan tidak yakin kepada Tuhan menurutnya akan menggiring orang untuk berbuat penyimpangan-penyimpangan dan penelewengan dari aturan Allah swt yang pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Jika orang-orang yang tidak amanah dan tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan maka akan terjadilah kebijakan-kebijakan yang diselewengkan dalam pemerintahan.

Dalam tulisan ini, penulis akan fokus mengkaji pemikiran keagamaan Syafruddin Prawiranegara, lebih khusus pemikirannya tentang agama dan negara. Syafruddin Prawiranegara menurut penulis adalah salah seorang intelektual yang produktif di masanya, hal ini dapat disimpulkan dari fakta yang dapat penulis kumpulkan. Ada 86 tulisan beliau yang membicarakan berbagai kondisi umat termasuk yang terjadi di Indonesia. Uniknya pemikirannya selalu bersandar kepada agama yang dianutnya yaitu Islam. Berdasarkan inilah penulis merasa perlu menyibak pemikiran keagamaannya khususnya pemikirannya tentang agama dan negara. Syafruddin Prawiranegara dalam karyanya *Al-aqobah (Pendakian yang tinggi beberapa pikiran tentang pembangunan)*, menjelaskan bahwa ideologi/keyakinan akan mempengaruhi sikap dalam berbagai hal, ideologi/keyakinan menurutnya merupakan *driving force* yaitu sebagai motor penggerak termasuk dalam bidang ekonomi dan pembangunan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Syafruddin Prawiranegara, 236-237

<sup>31</sup>Syafruddin Prawiranegara, *Al-aqobah Pendakian yang Tinggi beberapa pikiran tentang Pembangunan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 1.

Berpijak dari ungkapan Syafruddin Prawiranegara di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran keagamaan Syafruddin Prawiranegara ini, utamanya yang berkaitan dengan masalah agama dan negara, dan penulis tangkan dalam bentuk Disertasi.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Permasalahan**

Dengan berpijak kepada latar belakang dan pokok-pokok pikiran di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah pandangan pemikiran keagamaan Sjafruddin Prawiranegara tentang agama dan negara.

### **2. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini maka penulis merasa perlu menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang sosial- politik Sjafruddin Prawiranegara?
- b. Bagaimana Unsur-unsur agama dan negara dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara.?
- c. Bagaimana Islam, Demokrasi dan pancasila menurut Sjafruddin Prawiranegara ?
- d. Bagaimana Islam dan keadilan sosial (Kesejahteraan rakyat menurut Sjafruddin Prawiranegara)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menjelaskan latar belakang sosial-politik pemikiran keagamaan Sjafruddin Prawiranegara
- b. Untuk Mengetahui dan menjelaskan unsur-unsur agama dan negara dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara.
- c. Untuk Mengetahui dan menanalisa Islam dan Pancasila dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara.
- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan keadilan sosial (kesejahteraan rakyat) dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan program studi S3/program Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai sumbangan penulis untuk menambah khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang pemikiran dan filsafat agama, setidaknya memberikan gambaran suatu corak hubungan agama dengan negara menurut pemikiran Syafruddin Prawiranegara.
- c. Sebagai *mauizhah* pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara serta masyarakat sebagai warga negara untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan individu, golongan kelompok serta partai. Keikhlasan dan kegigihannya dalam perjuangan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai agama Islam. Hal seperti ini sewajarnya menjadi sumber bacaan bagi penyelenggara negara hari ini.

### D. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah penulis temukan, *Pertama*, Ajib Rosidi pernah menulis tentang Syafruddin Prawiranegara dalam karyanya berjudul “*Syafruddin Prawiranegara Lebih takut kepada Allah SWT*”, karya ini hanya gambaran tentang biografi Syafruddin Prawiranegara dan belum menjelaskan secara detil pemikiran-pemikiran keagamaannya. *Kedua*, Ajib Rasidi juga telah mengupayakan dan mengusahakan kajian khusus tentang pemikiran ekonomi Syafruddin Prawiranegara namun hanya sebatas mengumpulkan dan merekap karya-karya Syafruddin Prawiranegara dalam bidang ekonomi, yang diberi judul dengan “*Ekonomi dan Keuangan makna ekonomi Islam.*”

Menurut Penulis, paling tidak Ajib Rosidi telah berusaha mengumpulkan dan meramu semua karya Syafruddin Prawiranegara yang tersebar dalam berbagai media sehingga berbentuk buku yang dapat dipublikasikan.

*Ketiga*, hasil penelitian Pipip Rifa'i pada tahun 2012, Penelitian ini juga fokus kepada corak dan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Syafruddin Prawiranegara, khususnya di Indonesia. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep ekonomi Syafruddin Prawiranegara adalah ekonomi pembangunan yang didasari dengan nilai-nilai Islam.

*Keempat*, Ali Wardana juga telah menulis sebuah Tesis pada tahun 2010 dengan judul Pemikiran ekonomi Syafruddin Prawiranegara. *Kelima*, Tesis penulis sendiri yang berjudul “ Prinsip-prinsip aqidah dalam Ekonomi Islam Menurut Syafruddin Prawiranegara” Pada tahun 2005, Penelitian ini fokus pada prinsip aqidah dalam ekonomi menurut pandangan Syafruddin Prawiranegara.

Sedangkan dalam kajian penelitian penulis saat ini akan fokus kepada pemikiran keagamaan Syafruddin Prawiranegara, yaitu tentang agama dan negara, karena sebagai mana ungkapan beliau, “Bagaimanapun orang tidak bisa melepaskan diri dari keyakinan yang dianutnya, dan itu yang akan menjadi pijakan mereka dalam berperilaku dalam kehidupan, pribadi, masyarakat berbangsa dan bernegara.”

#### **E. Kerangka Berfikir**

Agama merupakan pedoman hidup manusia yang diturunkan Tuhan agar tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana telah diformulasikan oleh jumbuh ulama bahwa agama itu adalah “ Undang-undang Tuhan yang dapat menunjuki manusia ke pada kebenaran dalam berkeyakinan, juga dapat menunjuki manusia kepada kebaikan dalam berperilaku dan hubungan sosial.” Sedangkan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak warganya dalam mencapai tujuan bersama yaitu keadilan sosial. Dalam perkembangannya hubungan agama dan negara di berbagai wilayah telah mengalami berbagai dinamika.

Di samping itu negara dalam formulasi sejarah juga mengalami berbagai bentuk perubahan, misalnya dalam sejarah semenjak Plato, tercatat bahwa negara pada mulanya berbentuk timokrasi, dari timokrasi menjadi oligarki, seterusnya melalui demokrasi menjadi tirani, kemudian

dari tirani beralih menjadi negara ideal. Dengan demikian bentuk-bentuk negara mempunyai siklus perubahan.<sup>32</sup>Negara dalam makna kedaulatan dapat dibagi kepada beberapa bentuk, sebagai mana dijelaskan oleh Kabul Budiono dalam buku *Filsafat Ilmu Politik*, bahwa ada empat teori kedaulatan yaitu; Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum, Rakyat dan Negara.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut Kabul Budiono bahwa negara mempunyai tugas mengendalikan, juga mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan yang ada dalam sebuah negara itu ke arah tercapainya tujuan bersama.<sup>34</sup>Di samping itu negara memiliki otoritas memaksa terlaksanakan peraturan dan perundangan-undangan untuk mencapai tujuan hidup bernegara.

Di antara teori-teori tentang negara, yang telah dikemukakan oleh ahli politik adalah;

Pertama, Teori Lord Sang, menurut Lord Sang dalam suatu kekuasaan pemerintahan negara terdapat dua kepentingan yaitu Pemerintah dan rakyat, adakalanya salah satu diantara keduanya melemah dan menguat. Dalam pandangan Lord Sang Pemerintah harus selalu kuat agar dapat menentukan arah negara dan agar tidak terjadi anarkis, jika terjadi sebaliknya Rakyat yang menjadi kuat dan pemerintah lemah maka ini jelas merugikan pemerintah.

Kedua, Teori Niccolò Machiavelli menjelaskan bahwa Negara harus selalu berada di atas semua aliran, bagaimanapun lemahnya pemerintah harus memperlihatkan lebih berkuasa daripada aliran-aliran yang ada, seolah pemerintah harus bisa memposisikan diri kapan akan menjadi singa dan kapan akan menjadi kancil yang cerdas untuk menguasai rakyat.

---

<sup>32</sup> A.Ezzati, *Gerakan Islam*, (Jakarta:Pustaka Hidayah,1981),7-8

<sup>33</sup> Kabul Budiono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung:Alfabeta,2012),29.cetakan

<sup>34</sup> Kabul Budiono, *ibid*, h.30

Ketiga, Teori Dante Alighiere, Dante mengatakan bahwa Paus hanya berdaulat dalam masalah kerohanian saja, sekalipun negara menganjurkan terhadap keagamaan umat. Paus tidak boleh ikut campur dalam masalah kenegaraan Itali ketika itu. Berdasarkan itulah Dante menganjurkan bahwa negara bertujuan menciptakan perdamaian dunia, oleh karena itu negara harus menciptakan undang-undang yang seragam bagi umat manusia. Jadi Dante merupakan tokoh yang anti Paus dan menganjurkan bahwa kekuasaan harus berpusat pada seorang raja. Sekalipun Dante terkesan orang yang anti Paus tapi dia juga seorang yang taat beragama dan selalu menganjurkan agar umat mengabdikan kepada Tuhan.

Keempat; Teori Tujuan negara menurut Immanuel Kant, menurut Kant Tujuan negara adalah menegakkan hukum. Menjamin hak-hak dan kebebasan warganya. Rakyat dan pemerintah merupakan sama-sama subyek hukum. Kant menganjurkan tidak adanya perbedaan antar golongan dan individu dalam suatu negara, penduduk harus diperlakukan sama.

Kelima; Teori tujuan negara menurut Kaum Sosialis, Kaum Sosialis mendasari pemikirannya atas dasar hak-hak yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama pula. Berdirinya negara dalam pandangan Sosialis adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap manusia. Kebahagiaan akan didapatkan jika mata pencaharian dan mempunyai penghasilan yang layak serta adanya jaminan dari negara bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar.

Keenam; Rumusan Kapitalisme dalam hal tujuan negara adalah mementingkan hak-hak individu/perorangan, tiap-tiap orang berusaha mencapai kebahagiaan sendiri-sendiri. Filsafatnya adalah memperjuangkan hidup yang bebas dalam rangka tatanan beradab yang dilindungi undang-undang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kabul Budiono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 33-37

Ahmad Tafsir dalam bukunya “*Filsafat umum dari Thales sampai Capra*” mendefinisikan term agama dengan “Sistem kepercayaan dan praktek yang sesuai dengan kepercayaan tersebut”<sup>36</sup>. “Term agama sangatlah kompleks, universal dan terkadang berada di luar wilayah rasionalitas manusia. Berdasarkan pernyataan Ahmad Tafsir di atas dapat dipahami bahwa agama melingkupi wilayah-wilayah yang sangat luas, termasuk wilayah negara. Agama dan negara telah banyak menyita perhatian para ahli dalam berbagai wacana dan perdebatan, setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang hubungan agama dan negara, yaitu: Teori Teokrasi, teori sekuler dan teori Komunis.

Teori teokrasi adalah suatu teori yang mengaggap bahwa negara merupakan kekuasaan Tuhan, oleh karena itu negara tidak boleh terlepas dari agama, karena dalam pemahaman sederhana agama adalah sebagai instrument *ilahiyyah* untuk memahami dunia dan seisinya.<sup>37</sup> Teori sekuler adalah teori yang menjelaskan bahwa agama dan negara harus terpisah, karena negara merupakan urusan publik dan agama merupakan urusan individu-individu. Teori yang ketiga adalah teori komunis yang menjelaskan bahwa agama hanya untuk kaum yang tertindas, dengan demikian tidak ada hububngannya dengan negara.

Abul A’la Al-Maududi, menjelaskan, tiga ajaran yang dikembangkan oleh barat dalam perssoalan relasi agama dan negara, dan dipraktekkan oleh banyak negara modern, yaitu: Pertama, sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan formal dan pemerintahan). Kedua, nasionalisme dan Ketiga, demokrasi.<sup>38</sup>

Pada era modern ini, membicarakan negara tidak terlepas dari pembicaraan demokrasi yang dimaknai dengan *Authority dan legalized*

---

<sup>36</sup>Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum ‘Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra’* (Bandung : Remaja Rasda Karya, 2001),7-8, Lihat juga Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD-45 dan Piagam Madinah* (Ponoroga : STAIN Ponoroga Press),18.

<sup>37</sup> Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Politik Islam di Indonesia*,(Jakarta : Democracy Project,2011), 6. Lihat juga Robert.N. Bellah, *Beyond Belief:Esay On Religion in a Post Traditional Word*, (Los Angles: Univercity of California Press, 1991), h.146

<sup>38</sup>Maman Abdul Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

*power*, itu artinya mencakup kemampuan untuk memerintah agar orang-orang taat terhadap keputusan-keputusan yang ada. Pendapat ini dilontarkan oleh Al-mawardi seorang tokoh Islam yang sangat dikenal dengan berbagai pendapatnya tentang negara. Sedangkan Max weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk menyandarkan masyarakat terhadap kemauan-kemauan sendiri.

Dalam Islam, kajian demokrasi sudah banyak mengundang perhatian para ilmuwan dan intelektual muslim. Pertanyaan yang sangat penting kita jawab dalam tulisan ini adalah, apa yang dimaksud dengan demokrasi: Demokrasi sebetulnya tak lebih dari masalah negara dan hak warganya, hubungan negara dengan rakyatnya, warga dipandang sama dimata hukum. Inilah makna demokrasi yang hakiki.

Untuk memperjelas dan memperkokoh pemahaman kita tentang demokrasi ini, kiranya perlu penulis kemukakan demokrasi dalam perspektif sejarah; Sejarah telah mencatat, bahwa orang yang pertama mencetuskan istilah demokrasi ini adalah Plato seorang pilosof Yunani. Beberapa karyanya yang bersentuhan langsung dengan masalah ini adalah Pertama; *Politeia* yang membahas negara ideal dalam pandangan ilmu pengetahuan, kedua; *Politicos* buku ini lebih banyak membahas tentang ahli-ahli negara, bagaimana idealnya seorang pengelola negara, ketiga; *Nomae* buku ini banyak mengupas tentang undang-undang negara.

Ringkasnya menurut Plato, Negara itu adalah sebuah lembaga atau organisasi yang lebih mementingkan kebaikan orang banyak atau kepentingan umum. Oleh karena itu sebuah negara itu harus negara ideal yang bisa mengayomi kepentingan dan hajat orang banyak. Sebuah Negara harus dipimpin oleh seorang yang berilmu pengetahuan, sedangkan oarang yang berilmu pengetahuan itu menurut Plato adalah Pilosof. Menurut Plato pilosoflah yang berhak memimpin negara ini, hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara ideal dibawah sendi-sendi ilmu pengetahuan. Pemikiran ini dikemukakan Plato di saat negara yang

didiaminya itu adalah negara yang sedang mengalami kekacauan, yang belum bisa mengayomi semua warganya dalam berbagai hal, sehingga situasi politik ketika itu tidak menentu.

Dari beberapa pemikiran plato di atas dapat dipahami bahwa tujuan plato mengajukan demokrasi itu adalah agar terpilihnya seorang pemimpin negara yang bisa bertanggung jawab penuh terhadap ilmu pengetahuan sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin dan dapat dipertahankan. Orang yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyat itu harus dipilih oleh rakyat, sesudah pemimpin dipilih oleh rakyat maka rakyat harus patuh dan taat terhadap peraturan peratutan yang telah ditetapkan, itu artinya negara haruslah negara hukum.

Jadi, pada prinsipnya Demokrasi itu sangat baik, jika dijalankan dengan kaidah-kaidah yang benar. Namun jika tidak dijalankan dalam kaidah yang benar maka ini akan bisa jadi bumerang dalam kehidupan bernegara. Sebagai contoh dapat kita kemukakan disini, demokrasi barat 1960 menganggap Al-jazair sebagai bagian dari teritorial Prancis, sedangkan Al-jazair ini adalah negara yang berdaulat sendiri. Ini artinya demokrasi diperalat untuk merampas dan merampok hak orang lain. Prilaku Prancis ini sampai-sampai menghalalkan pembantaian warga Al-jazair.

Abdul Gani Arrahal dalam buku “ *Al-islamiyun wa sarab ad-dimuqrathiah* ” sebagai mana dikutip kembali oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam. “mendefenisikan demorasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat”. Konsep demokrasi ini sudah menjalar ke berbagai belahan dunia, misalnya Prancis dengan konsep kebebasan, persaudaraan dan persamaan/ dengan semboyan Hak Asasi Manusia, Islam juga bicara Hak Asasi Manusia, Hak-hak Asasi Manusia yang harus diperjuangkan dalam Islam adalah sebagai berikut : pertama, hak Perlindungan terhadap agama atau keyakinan. Kedua, hak perlindungan terhadap akal. Ketiga, hak perlindungan terhadap

jiwa.Keempat, hak perlindungan terhadap harta. Kelima, hak perlindungan terhadap keturunan.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa teori tentang agama dan negara yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin mengungkap satu bentuk/corak pemahaman tentang hubungan agama dengan negara, yaitu pemahaman Syafruddin Prawiranegara (1911-1989 M).

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

Agama: Keyakinan kepada yang *Ghaib* dengan mengerjakan yang berkaaitan dengan ritusnya bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>40</sup>

Negara: 1. Organisasi yang dibentuk oleh manusia dalam satu wilayah yang punya kuasa tertinggi, dan dipatuhi oleh rakyat, 2. “Kelompok sosial yang berbentuk organisasi politik, berdaulat dan berhak menentukan tujuan Nasionalnya”.<sup>41</sup>

Pemikiran: Ide,konsep,gagasan atau pandangan seseorang. Selanjutnya ide dan gagasan itu banyak dituangkan dalam tulisan-tulisan dan manuskrip-manuskrip yang lebih ringkas.

Sjafruddin Prawiranegara: Adalah seorang tokoh pergerakan Nasional, pejuang yang tulus ikhlas dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, lahir di Anyer Kidul 28 Februari 1911 dan wafat pada taggal 15 Februari 1989 dalam usia 78 tahun, sarjana hukum dan seorang ahli fiskal yang menyusun perencanaan ekonomi bangsa Indonesia sebelum proklamasi bersama Muhammad Hatta. Disamping itu, Sjafruddin juga seorang yang terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan, politikus yang menetapkan pilihan partainya kepada Masyumi. Di Masa pergerakan PRRI juga seorang tokoh yang ikut

---

<sup>39</sup>Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu Menyingkap borok-borok Pemilu dan membantah Syubhat Para pemujanya*, (Banyumas: Pustaka Salafiyah 2007), 33. cet- ke-empat terjemahan. Abu Muqbil Ahmad Yuswaji dan Abu Nizar Arif Mufid.

<sup>40</sup>Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *KUBI*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 27. Cet-ke-2

<sup>41</sup>Tim Penyusunan KUBI, 610.

bergabung dengan PRRI dan memimpin perjuangan pergerakan PRRI, sehingga bagi pemerintah saat itu beliau dianggap sebagai pemberontak.

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah: Ide, konsep, gagasan Syafruddin Prawiranegara tentang agama dan negara. Syafruddin Prawiranegara telah mengemukakan dalam berbagai karyanya bahwa negara yang dibangun harus berdasarkan idiologi dan keyakinan yang kuat, sedangkan idiologi dan keyakinan itu ada dalam agama, maka dengan demikian agama tidak bisa dilepaskan dari negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode**

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan dengan menggunakan paradigma rasionalistik identik yang menggunakan pendekatan filsafat. Penelitian filsafat menfokuskan pada substansi pemikiran. Ia lebih menekankan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topic kajian yang sedang diteliti.<sup>42</sup> Penelitian jenis ini berisikan satu topik dan gagasan yang diperoleh dari sumber pustaka,<sup>43</sup> yaitu dengan menitik beratkan pada topic tentang relasi agama dan negara dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Disertasi ini akan menggunakan pendekatan interdesipliner dengan pendekatan *antropologi, sosiologi, psikologi, histori dan teologi*. Pendekatan *Antropologi* sangat membantu penulis untuk memahami tipe-jenis manusia (*human types*) dan sosial-budaya, serta untuk memahami keadaan kultur masyarakat yang bersumber dari nilai budaya, nilai serta norma yang mengikat masyarakat.

Pendekatan *sosiologi* berguna untuk menjelaskan interaksi yang terjadi dalam satu komunitas masyarakat-dalam hal ini inteaksi warga

---

<sup>42</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 109

<sup>43</sup> Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, h. 109

dengan pemerintah, rakyat dengan negara. digunakan *metode histories*. Metode Historis dengan artian, sebagai “cerita tentang perbuatan-perbuatan dan capaian-capaian manusia yang hidup dalam kelompok tertentu ,”sehingga dapat menggambarkan suatu *story* yang pantas untuk diungkapkan dalam rangka mendeskripsikan *story* tersebut, sekaligus dalam rangka untuk memahami peristiwa-peristiwa (fenomena) yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat.<sup>44</sup>

Penelitian ini lebih berbentuk *deskriptif-analitis*; tentang data penting atau naskah yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji,<sup>45</sup> yaitu berkenaan dengan pemikiran Sjafruddin Prawiranegara tentang Agama dan negara. Beberapa pendekatan ini akan digunakan secara menyeluruh.

Di samping pendekatan sejarah, dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam memahami pengaruh keyakinan dan pemahaman keagamaan Sjafruddin Prawiranegara dalam perkembangan hidupnya, mulai semenjak kecil hingga dewasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Arnold Van Gennep bahwa “Ritual yang dilakukan oleh seseorang atau etnis tertentu mengalami masa-masa peralihan dan perubahan, yang dikenal dengan teori *Rite de Passage*”. Ritual itu menunjukkan transisi dari satu tahap ke tahap lain. Seperti masa kecil, remaja, dewasa bahkan sampai meninggal.<sup>46</sup> Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat akan mengalami *Rite de Passage* dalam berbagai bentuk dan cara, mulai dari bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang sangat rumit, yang dalam istilah Van Gennep adalah *Megic-Religius Cerimonies dan Megic*

---

<sup>44</sup>Lihat G.J. Renier, *History its Purpose and Method*, diterjemahkan oleh Muin Umar, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997) h.29-32.

<sup>45</sup>Secara khusus cara-cara penggunaan dokumen terutama yang berkaitan dengan penelitian sejarah dan ilmu-ilmu sosial, telah dibahas secara piawai oleh Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, ed.Koentjaraningrat, cet.xiv, ( Jakarta :Gramedia,1997) h.44-69.

<sup>46</sup> Arnold Van Gennep, *Rite Of Passage*, (London:Rotledge Library Edition, Antropology and Ethnography, 2004), h.9

*Cicles*.<sup>47</sup> Batasan secara teologis dimaksudkan untuk menjelaskan posisi Islam dalam negara, utamanya dalam formulasi hubungan agama dan negara di Indonesia. Selain terkait dengan faktor teologi, bersamaan dengan itu, juga akan menggunakan faktor psikologis.<sup>48</sup> Oleh karena, pendekatan psikologi menjadi diperlukan untuk memahami kepribadian seseorang. Sehingga penulis bisa menyelami secara baik pemikiran tokoh yang sedang peneliti bahas., Karena perilaku merupakan manifestasi dari kejiwaan dan kepribadian. Di samping itu fenomena tersebut, sesungguhnya bersifat internal bersumber dari keyakinan yang dimiliki seseorang.

Penelitian ini bercorak studi tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (*Individu Life History*) merupakan salah satu jenis Penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk melihat dan meninjau aspek-aspek tertentu dalam diri tokoh tertentu.<sup>49</sup> Studi tokoh ini termasuk kedalam Ilmu sosial digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana reaksi, tanggapan, interpretasi. Berusaha memahami diri tokoh itu secara kualitatif.<sup>50</sup> Dalam penelitian studi tokoh ini, menurut Vredenbeegt dan Bungin yang dikutip Arif Furchan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan diantaranya : pendekatan tematis dan pendekatan otobiografi.

Tokoh yang diteliti dalam penelitian ini adalah tokoh nasional pejuang kemerdekaan dan tokoh nasionalis religious yang sudah wafat, oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau dan berbagai gejala keagamaan yang berkaitan dengan masalah politik atau agama dan negara, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>51</sup> Proses rekonstruksi

---

<sup>47</sup> Van Gennep, *Rite de Passage*, h.9-10

<sup>48</sup> Catherine Bell, *Ritual Perspectives and Dimension*, (New York, Oxspord University Press, 1997), h. 102

<sup>49</sup> Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.31

<sup>50</sup> Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, h. 31

<sup>51</sup> Secara teknis penelitian sejarah dibedakan dengan pendekatan sejarah, Pendekatan sejarah merupakan alat analisis untuk memahami fenomena sosial keagamaan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi hari ini merupakan hasil proses sejarah masa

dalam sebuah penelitian sejarah, tidak bisa dilakukan secara umum, melainkan perlu adanya fokus tertentu yang dijadikan sebagai bahasan. Selanjutnya, ditegaskan oleh Sumadi Suryabrata, bahwa proses rekonstruksi harus dilakukan secara sistematis, Obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>52</sup> Dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Agama dan Negara, dalam artian relasi antara agama (Islam) dan negara dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara.

### 3. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari dua bentuk yaitu; sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>53</sup> Prosedur pengumpulan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap penelitian terfokus. Pada tahap pertama, (tahap orientasi), peneliti berusaha mengumpulkan data secara umum tentang tokoh dalam hal ini Syafruddin Prawiranegara lewat karya-karyanya dan mencari hal-hal menarik dan penting dari pemikiran sang tokoh, dalam hal ini pemikiran beliau tentang agama dan negara. Pada tahap kedua, Eksplorasi, peneliti akan mengumpulkan data lebih terarah dan fokus sesuai dengan fokus penelitian penulis, Pada tahap studi terfokus; peneliti akan melakukan studi secara mendalam dan terfokus pada masalah keberhasilan, keunikan dan karya-karya sang tokoh yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam masyarakat,<sup>54</sup> terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

lampau. Lihat U. Maman Kh. Dkk, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik* ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 150. Lihat juga dalam Suyuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 119

<sup>52</sup>Sumadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 73

<sup>53</sup>Sumber data primer adalah sumber data berupa dokumen, catatan, arsip, karya-karya dari tokoh yang bersangkutan. Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang bersal dari tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan tokoh yang sedang diteliti.

<sup>54</sup>Subrata, *Metodologi Penelitian*, h. 47-49

Pengumpulan data-data terhadap tokoh yang sudah meninggal dapat dilakukan lewat pengumpulan karya-karyanya yang dijadikan sumber data primer bagi penelitian yang penulis lakukan. Disamping itu penulis juga akan menjadikan karya-karya orang lain yang dianggap berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan sebagai literatur penunjang dalam penelitian ini.

Sedangkan data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menelaah data-data dengan maksud menemukan pokok-pokok permasalahan dan hubungannya di antara bagian-bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pokok-pokok yang dibahas dalam pemikiran Syafruddin Prawiranegara ini

#### **4. Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang menggunakan perspektif mikro-yaitu melakukan *understanding* (pemahaman), deskriptif (penggambaran), interpretasi (penafsiran), pengembangan, dan komparatif (perbandingan) maka penelitian ini juga bisa digolongkan kepada penelitian kualitatif.<sup>55</sup>

Model penelitian kualitatif ini yang merupakan studi kasus, grounded theory dan everyday Life, sedangkan analisis yang digunakan adalah berupa deskriptif-analisis, analisis induktif dan analisis isi atau yang disebut juga dengan *Content analysis*.<sup>56</sup> Analisis isi yang dimaksudkan di sini adalah penulis akan mencoba menanalisa informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Syafruddin Prawiranegara yang dituangkannya dalam bentuk dokumentasi tulisan dan buku-buku untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah, lebih khusus tentang relasi agama dan negara.

#### **G. Langkah-langkah Penulisan**

Penelitian tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematis guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Penelitian tokoh ini, termasuk kedalam salah satu jenis penelitian kualitatif.

---

<sup>55</sup>Subrata, *Metodologi Penelitian*, h.108

<sup>56</sup>Subrata, *Metodologi Penelitian*,

Sebagai jenis penelitian kualitatif, penelitian tokoh juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif.

Tujuan penelitian tokoh adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang dalam komunitas dan bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui karya-karyanya. Selain itu, tujuan penelitian tokoh adalah untuk memahami dan mendeskripsikan tentang keunikan tokoh sebagai sosok pribadi dalam konteks komunitas dan sosial.

Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian tokoh ini, pertama menentukan bidang kajian yaitu bidang agama dan negara, kedua, melacak informasi tentang Syafruddin dari berbagai tulisan dan karya-karyanya serta informasi dari orang-orang yang pernah bersentuhan dalam kehidupan sosial dengan beliau. Setelah penulis berhasil mengumpulkan karya-karyanya barulah penulis memilah-milah kiunikan pemikirannya yang kebanyakan dituangkannya dalam bentuk buku-buku dan tulisan-tulisan lepas.

Sebagai *Gaiden* dan untuk mengetahui rancangan umum penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menyusun langkah-langkah penulisan Disertasi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu; Latar belakang masalah, Permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Hasil penelitian terdahulu, Kerangka berfikir, metode penelitian dan langkah-langkah penulisan.

Bab II menjelaskan yang berkaitan dengan Agama dan Negara tinjauan historis, yaitu; Agama dari masa ke masa, Agama dan negara dalam lintasan sejarah, agama dan negara perspektif Islam serta agama di Indonesia.

Bab III Bab tiga dalam disertasi ini menjelaskan kehidupan dan pemikiran sjafruddin Prawiranegara, Biografi Syafruddin Prawiranegara, Perjuangan Syafruddin Prawiranegara, Pandangan para tokoh tentang Syafruddin Prawiranegara, serta karya-karya sjafruddin Prawiranegara.

Bab IV akan menjelaskan masalah pokok dari penelitian ini yaitu; pemikiran Syafruddin Prawiranegara yaitu ; Latar belakang social politik pemikiran Syafruddin Prawiranegara, Unsur-unsur agama dan negara menurut

Sjafruddin Prawiranegara, Islam dan Pancasila menurut Sjafruddi Prawiranegara, serta Islam dan keadilan sosial (kesejahteraan rakyat) menurut Sjafruddin Prawiranegara.

Bab V merupakan bab akhir dari penelitian ini memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka.

